



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

Safe and Fair:
Realizing women migrant workers' rights and opportunities in the ASEAN region

Integrasi Layanan MRC yang Responsif Gender di dalam LTSA untuk Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran di setiap Tahapan Migrasi

Progress 2022

Sinthia Harkrisnowo

Koordinator Program Safe and Fair – International Labour Organization (ILO)

SITUASI TERKINI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TINGGINYA TINGKAT PENGADUAN KASUS YANG BERULANG

Total **12.508** (Data BP2MI, 2017–2019) Kasus dilaporkan oleh Sektor Rumah Tangga dan ABK, mayoritas kasus pelanggaran hak Ketenagakerjaan (gaji tidak dibayar, penahanan dokumen, kekerasan,), pelecehan, tindak pidana perdagangan orang, overcharging, dan klaim asuransi

Tidak memahami hak Ketenagakerjaan, prosedur migrasi, persyaratan bekerja, dokumen yang dibutuhkan, standard layanan dan kriteria BLKLN dan P3MI.
Hambatan Akses Layanan Dasar, Pengaduan Kasus, Psikososial, Pendampingan proses lapor&sidang

REFORMASI TATA KELOLA UUPPMI 18/17

Mandat Pasal 31 Prinsip Penempatan: Negara tujuan memiliki regulasi melindungi hak tenaga kerja asing dan Indonesia memiliki MOU dengan negara tujuan.
Mandat Pasal 40 dan 42, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Sanksi tegas dan denda untuk Pelanggaran Koordinasi antar K/L, Pemerintah Desa – Perwakilan

JUMLAH PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN

70 Perempuan PMI dan Mayoritas bekerja pada Sektor Rumah Tangga dan Care Giver Data BP2MI untuk Kepulangan di 2021 : **139.547 (Procedural: M: 47741 and F: 91.806) dan Non Prosedural: 74.531** (51.859 L dan P 22.097
Tidak memahami Hak Ketenagakerjaan, prosedur migrasi, persyaratan dokumen, standar layanan BLKLN dan P3MI
Hambatan dalam mengakses Layanan Dasar, pengaduan kasus, pendampingan psikososial saat menghadapi proses siding atau pelaporan

SISTEM & MEKANISME KOORDINASI DAN LAYANAN DARI TINGKAT DESA

Pemahaman regulasi belum memadai Prosedur Migrasi Kapasitas Pemdes dan CBO

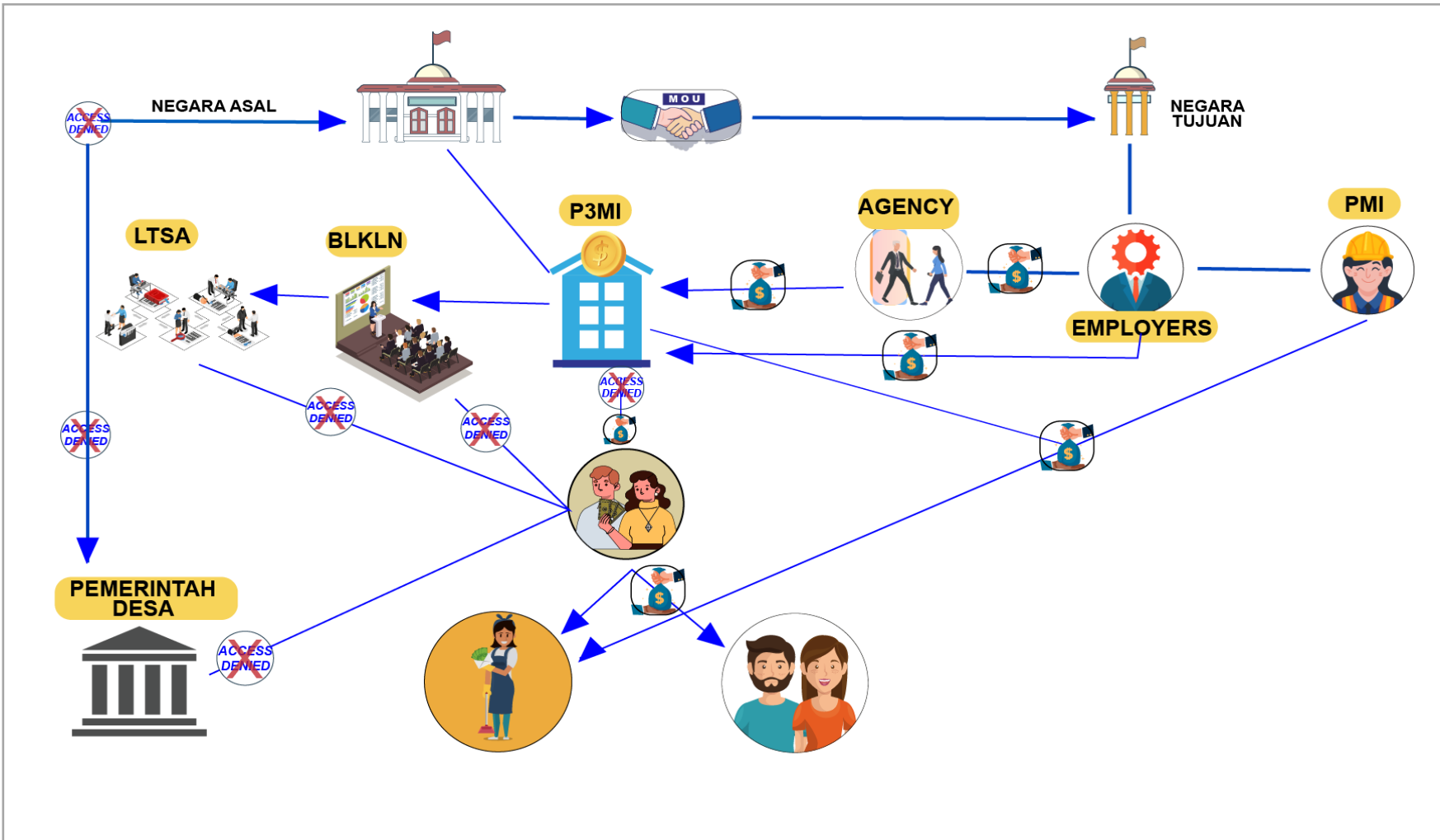
DESA PINTU GERBANG

Otonomi dan Dana Desa Belum optimalnya Data dan Layanan PMI Peran dan partisipasi Komunitas dan Perempuan Pekerja Migran dan keluarganya

BERBAGAI PROGRAM BERBASIS DESA

- Data PMI yang terkoordinasi belum tersistematis dimiliki oleh Pemerintah Desa
- Metode dan pendekatan yang belum efektif
- Replikasi dan keberlanjutan dengan dana desa
- Dampak pada Perlindungan PMI dan keluarga
- Serikat/Kelompok PMI dan keluarga terlibat dalam Musrembangdes (masih ada stigma/diskriminatif)

PETA AKAR MASALAH MIGRASI TENAGA KERJA



- UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 18/17
- UU Pemberantasan TPPO

UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

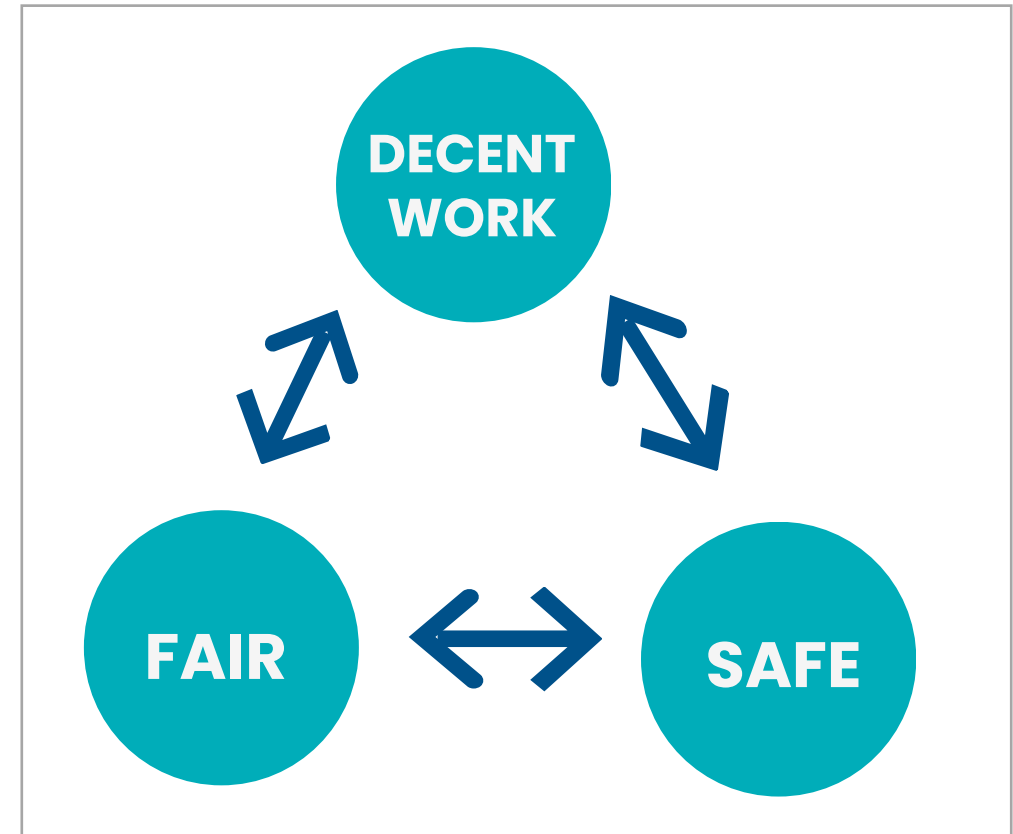
- Ancaman Kekerasan.
- Penculikan.
- Penyelesaian.
- Pemalsuan.
- Penipuan.
- Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan
- Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

MIGRASI AMAN DAN ADIL UNTUK KERJA LAYAK

KERJA LAYAK peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang layak; Produktif secara bebas, Adil, Aman dan Bermartabat

Bebas dari kekerasan dan praktik-praktik yang buruk (fisik, seksual, perdagangan manusia, psikologis, yang dilakukan oleh pasangan dan pihak lain termasuk kekerasan pada proses eksploitasi kondisi kerja dan migrasi.

Gender Equitable dalam akses, kesempatan, dan kondisi kerja. Pemenuhan hak *fundamental* pekerja migran dan akses Kerja Layak





Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

5

PEKERJA MIGRAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

**KONTRIBUSI POSITIF untuk
Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan**

- ❖ Sosial – Ekonomi
- ❖ Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- ❖ Tujuan 8 Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- ❖ Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

KERJA LAYAK

- ❖ Pekerja Rumah Tangga
- ❖ Non-Diskriminasi, Kesetaraan Gender
- ❖ Pemenuhan Hak dan Pelindungan di Setiap Tahapan Migrasi

INSTRUMEN INTERNASIONAL



STANDAR INTERNASIONAL KETENAGAKERJAAN

- KILO 97 tentang Migrasi Tenaga Kerja
- KILO 181 Tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta
- KILO 143 tentang Pekerja Migran Ketentuan Tambahan
- Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum (K-138) dan Konvensi ILO No. 182 Tentang Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk terburuk Pekerjaan untuk Anak (K-182)
- Konvensi ILO yang terkait Isu Kesenjangan Gender —Konvensi ILO 100, 111, 156, dan 183
- Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (K-87) dan Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama (K-98)
- KILO 189 Hak dan prinsip dasar perlindungan PRT dan mengharuskan negara untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah bagi kerja layak PRT.
- Konvensi ILO 190 tentang Mengakhiri Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
- Prinsip dan Panduan ILO untuk Perekrutan yang Adil



KONVENSI/INSTRUMEN PBB

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 26 tentang Pekerja Migran Perempuan
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya
- International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pekerja Migran
- Global Compact for Migration



A S E A N

- Deklarasi dan Konsensus ASEAN untuk Pelindungan Pekerja Migran
- Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di ASEAN, 2013
- Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan & Anak 2015

BEBERAPA REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN



UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NO.18/17

- **PP No 59 tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**
- PP Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI (PP 10/2020)
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Perpres 90/2019)
- Jamsos PMI (Permen 18/2018) – Proses Revisi
- Tata Cara Pemberian Izin P3MI (Permen 10/2019)
- (ada lagi draft peraturan turunan, Perpres Atase Ketenagakerjaan)



UNDANG-UNDANG COMPLEMENTARY (saling terkait & melengkapi)

- UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21/2007
- UU Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelindungan Hak hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
- UU RI No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Konsesus ASEAN



KEBIJAKAN TERKAIT

- **Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender**
- Keputusan Menteri Nomor 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- Kepdirjen untuk SOP BLKLN dan P3MI Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan PMI di masa adaptasi kebiasaan baru

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/813/SJ dan 460/812/SJ tentang Perencanaan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak



PENGEMBANGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN BERBASIS FAKTA DAN BUKTI

Evidence Based Research

- ✓ Analisis Gender Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 tahun 2017 untuk Peningkatan Pelindungan di Setiap Tahapan Migrasi – Kemenaker-ILO-Prof. Sulistyowati Irianto dan Tim PKWG UI
- ✓ Pemetaan dan Kajian Penilaian Kebutuhan Lembaga Penyedia Layanan dan Migrant Worker Resources Center – Arisman CSEAS
- ✓ Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender (Implementasi Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 tahun 2017) – Kemenaker- ILO-JBM-
- ✓ Panduan dan SOP Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan PMI pada Penempatan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Kepmen 294/2020 dan Kepdirjen No.3782/2021 – Kemenaker – ILO –Konsultasi Tripartite)

- ✓ Participatory Action Research (PAR) : Model Efektif Tata Kelola Berbasis Desa untuk Peningkatan Layanan kepada Perempuan Pekerja Migran dan keluarganya (Implementasi Pasal 42 Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 tahun 2017) – Kemenaker , ILO , SBMI-



- Riset Kualitatif dan Field Assesment
- Proses inklusif dan partisipatif yang bermakna, khususnya suara dan aspirasi perempuan pekerja migran di desa dan negara tujuan
- Rekomendasi Tripartite untuk Peraturan Turunan UUPPMI 18/17 dan Kebijakan Migrasi Kerja
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Migrasi Kerja yang Responsif Gender



SAFE and FAIR

Objective 1:

Perempuan pekerja migran lebih terlindungi dengan adanya kerangka kerja tata kelola migrasi pekerja yang sensitif gender

Objective 2:

Mengurangi kerentanan perempuan pekerja migran dari bentuk kekerasan dan perdagangan orang serta perempuan pekerja migran memperoleh manfaat dari layanan responsif yang berkualitas dan terkoordinasi; dan

Objective 3:

Data, pengetahuan, dan sikap tentang hak dan kontribusi perempuan pekerja migran meningkat.



KOMITE PENGARAH

Sejak 2018 anggota NPAC menyetujui untuk memberikan dukungan dan arahan kunci agar program *Safe and Fair* :

- Memperkuat lensa gender dalam regulasi dan penerapan UU 18/17 yang responsive gender untuk memperkuat pengembangan kebijakan, pedoman, dan layanan dukungan yang memenuhi kebutuhan dari seluruh pekerja migran.
- Meningkatkan koordinasi di berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan utama.



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

11

LAYANAN TERPADU SATU ATAP UNTUK PENEMPATAN & PERLINDUNGAN PMI DAN KELUARGANYA YANG RESPONSIF GENDER



PENANDATANGAN MOU DAN PERESMIAN PUSAT INFORMASI DAN LTSA PELINDUNGAN UNTUK PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA

12



Menaker Tinjau LTSA-P2MI Cirebon

LTSA

LAYANAN TERPADU SATU ATAP

PEMERINTAH
KABUPATEN /
KOTA





Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

14

KANTOR LTSA – MRC KOTA CIREBON



MRC
Layanan Informasi & Konseling

DIMOHON UNTUK
MENJAGA JARAK
MINIMAL 1 METER

MRC

PROSES PENGEMBANGAN INTEGRASI PUSAT INFORMASI DAN LTSA PELINDUNGAN YANG RESPONSIF GENDER

Rangkaian Riset untuk Pengembangan Peraturan Turunan dan Kebijakan

- Analisis Gender UUPPMI untuk Peningkatan Pelindungan PMI di Setiap Tahapan Migrasi
- Pemetaan Lembaga Penyedia Layanan dan Kajian Kebutuhan Perempuan PMI
- Model Tata Kelola Desa untuk Peningkatan Layanan kepada Perempuan PMI dan Keluarganya (Implementasi UPPMI Pasal 42)
- **Dasar Hukum LTSA Pelindungan (MRC)**
- **→ PP 59/2021 – UUPPMI 18/17 – Pasal 38 – 42**
- **Perpres No 16/2018**
- **Instruksi / SE Mendagri Implementasi UUPPMI 18/17**

Pengembangan Model Kerjasama dan Layanan

- Rekomendasi Tripartite Plus Pusat dan Daerah untuk Model, Lembaga yang Terlibat dan MOU
- Rangkaian Diskusi, Negosiasi untuk Program dan Kerjasama
- Kick Off Workshop Integrasi Layanan Integrasi LTSA-MRC yang Responsif Gender di 4 Kabupaten Percontohan

Implementasi dan Monitoring

Tripartite Plus Forum – Konsultasi dan Finalisasi MOU Launching dan Penandatanganan MOU Rangkaian Penguatan Kapasitas Pemberian Layanan Pelindungan Pengembangan SOP Layanan, Mekanisme Koordinasi dan Rujukan Strategic Meeting & Review

Evaluasi dan Keberlanjutan

Pembentukan Pokmas APBD / APBN untuk Pusat Informasi dan LTSA Pelindungan (MRC)

UUPPMI 18/17
PP 59/2021
Perpres Nomor 16/2018
Indonesian NGOs can now access government funds to provide services to communities – | Knowledge Sector Initiative (KSI) (ksi-indonesia.org)



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

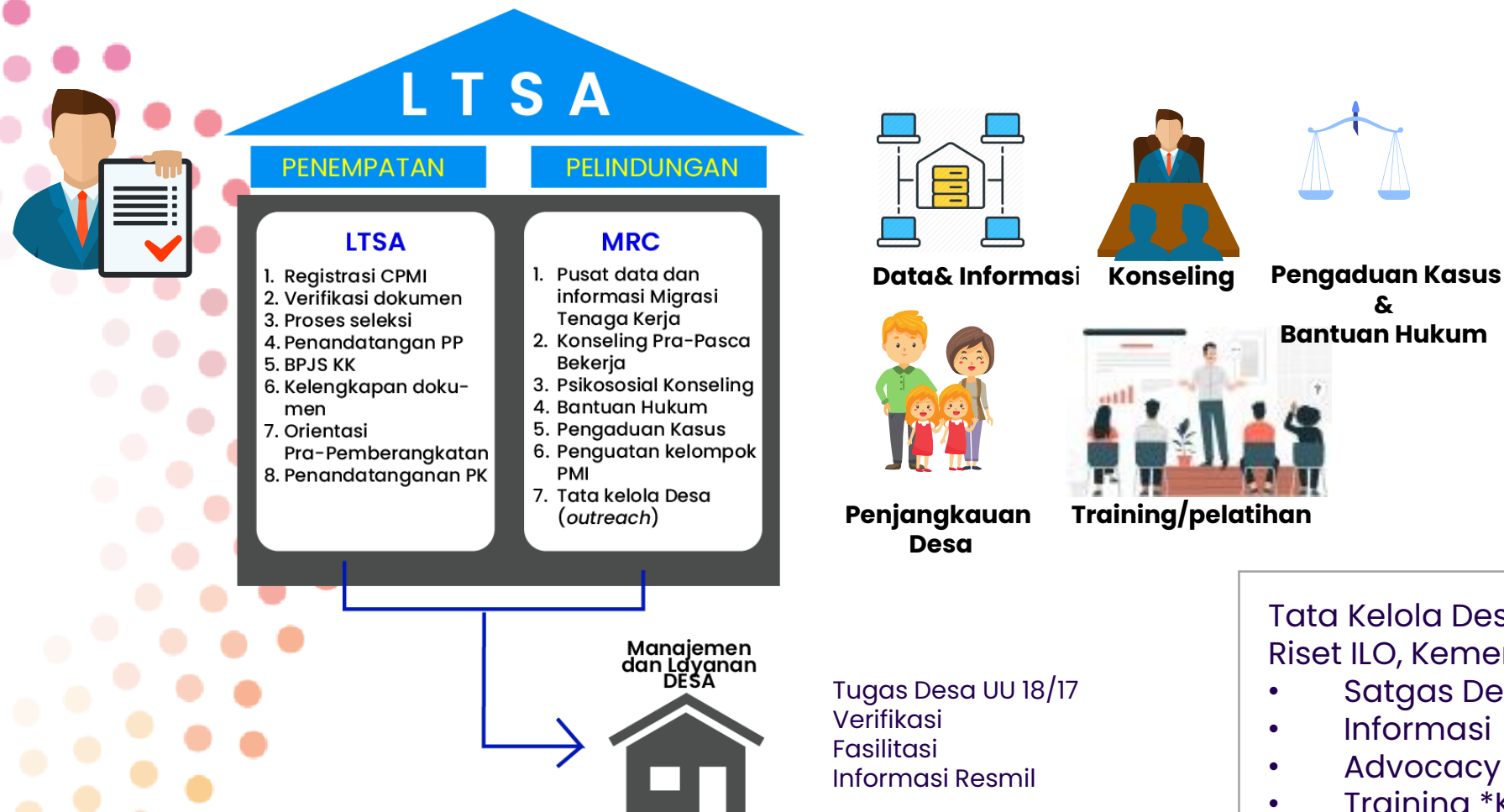


MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

17

PENGUATAN FUNGSI LTSA MELALUI INTEGRASI LAYANAN PELINDUNGAN MIGRANT WORKER RESOURCES CENTRE (MRC)



**THE SPIRIT OF MUTUAL
COLLABORATION AND
CONCRETE ACTION
FROM ALL ELEMENTS**

Tata Kelola Desa PMI rekomendasi Riset ILO, Kemenaker SBMI 2019

- Satgas Desa (SBMI – ILO)
- Informasi
- Advocacy Perdes
- Training *Knowledge products



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

18

Gender Responsiveness One Roof Integrated Services Office for Placement and Protection of Indonesia Migrant Worker (Integration MRC in the Government One Roof Services Office)



Full team of Gender Responsiveness One Roof Integrated Services office Government – Trade Union –
Women Crisis Center / Women Agency

(1) Cirebon:
Manpower / LTSA
Office – Women Crisis
Center and Indonesia
Migrant Worker Union

**(2) Blitar and (3)
Tulungagung District:**
Government LTSA
Indonesia Trade Union
Confederation and
Indonesia Women
Coalition

(4) East Lampung:
Government LTSA
Indonesia Migrant
Worker Union and
Indonesia Women
Coalition



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

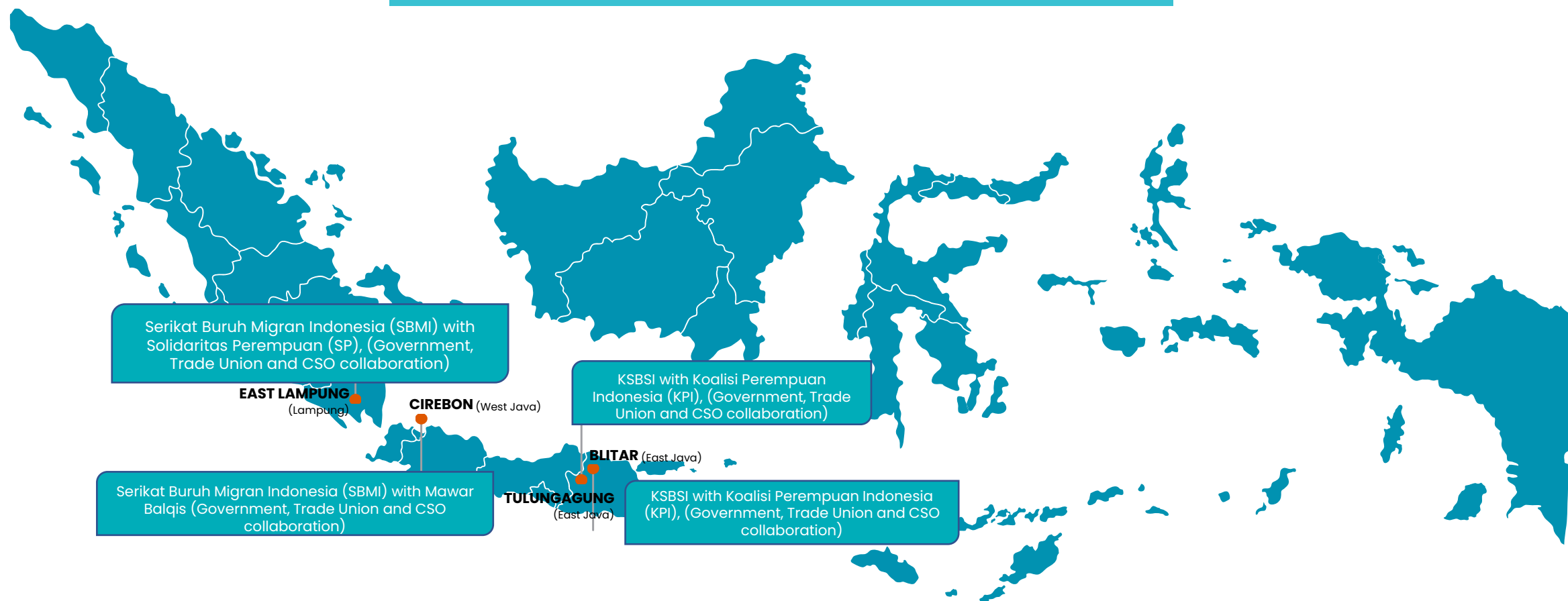


MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

19

4 KABUPATEN PERCONTOHAN





Spotlight Initiative



International Labour Organization



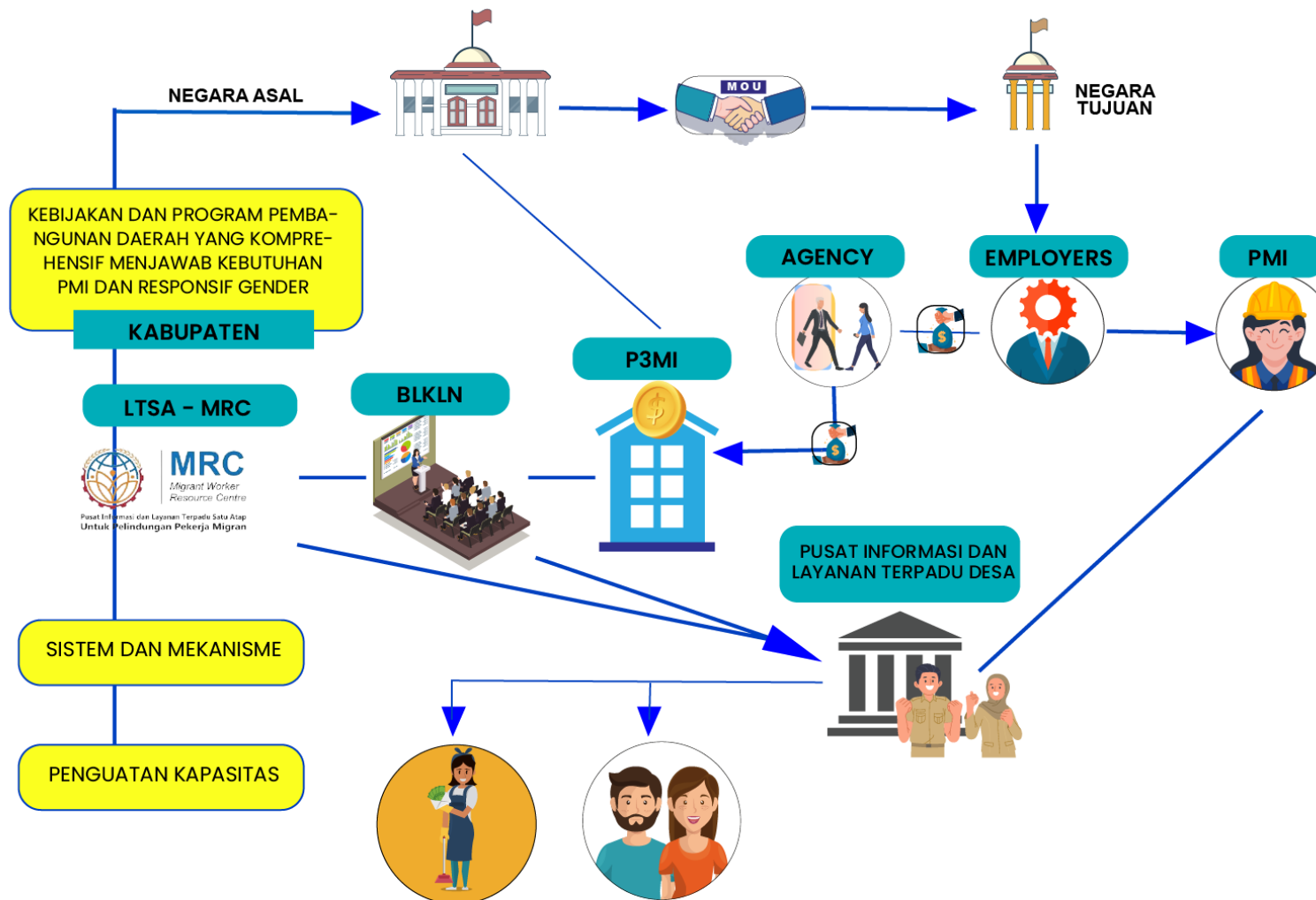
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA



MRC
Migrant Worker Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap Untuk Pelindungan Pekerja Migran

20



TUJUAN LTSA - MRC INTEGRATION

- ❖ Modelling Implementasi UUPPMI 18/17
- ❖ Penegakan Hukum UU Pemberantasan TPPU
- ❖ Layanan yang Terkoordinasi
- ❖ 36 Desa, 12 Kecamatan, 4 Kabupaten

DATA:

MEKANISME PENGADUAN
MEKANISME KOORDINASI
MEKANISME RUJUKAN



SISTEM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BERBASIS DESA YANG RESPONSIVE GENDER

PERLINDUNGAN PMI SEJAK DARI DESA

Masalah Yang Di Hadapi:

- Masih banyaknya calo
- Informasi tentang migrasi aman masih minim
- Tingginya pengaduan penipuan oleh oknum calo atau sponsor
- Layanan yang masih menstigma negative terhadap korban perempuan PMI

Manfaat untuk Desa

- Peraturan desa selaras dengan UU perlindungan migran nomor 18 tahun 2017
- Sistem perlindungan pekerja migran yang terkoordinasi
- Profil dan Data Desa
- Peningkatan dan kesadaran pola pikir prospektif akan perlindungan untuk pekerja migran yang responsive gender
- Sistem layanan yang terkoordinasi dari desa ke LTSA (adanya SOP dan mekanisme rujukan yang terkoordinasi dan penanganan kasus)
- SATGAS perlindungan PMI melibatkan Purna PMI, PKK, Tkoh Agama, dan Karang Taruna
- Penguatan serikat pekerja dan jaringan perempuan pekerja migran
- Layanan terpadu tingkat desa untuk perlindungan keluarganya



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

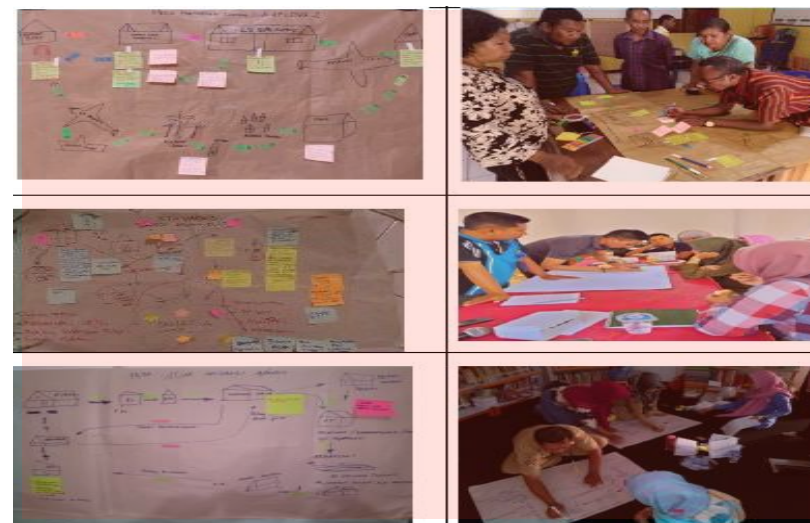
Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

22

LAYANAN TERPADU DAN TERKOORDINASI YANG RESPONSIF GENDER DARI TINGKAT DESA (MRC)



SATGAS PELINDUNGAN SK KEPALA DESA



PENGUATAN
PERAN DAN
PARTISIPASI
PEREMPUAN
PEKERJA
MIGRAN DALAM
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
DAN LAYANAN



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

23

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

◆ Pengembangan
Kebijakan yang
Berbasis Fakta, Bukti
dan Proses yang
Inklusif

◆ Pembentukan
Tripartite Plus Forum
Koordinasi dan
Dialog Sosial untuk
Migrasi

◆ Platform untuk PMI
khususnya
perempuan dalam
menyuarakan
aspirasi dan hak-
haknya





Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

24

PENGUATAN KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER DAN BERBASIS BUKTI



EU-UN Spotlight Initiative to Eliminate Violence against Women and Girls.
Safe and Fair: Realizing women migrant workers' rights and opportunities in the
ASEAN region

Panduan Teknis untuk Tripartite Plus dalam Pelaksanaan Undang- Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender

(Gender Guidelines untuk Tripartite Plus)

Riset Aksi Partisipatif (Participatory Action Research (PAR))
"Model Tata Kelola Berbasis Desa untuk Peningkatan
Layanan kepada Perempuan Pekerja Migran dan
Keluarganya"

"Pelaksanaan Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Pasal42 "



Laporan Pelaksanaan Participatory Action Research "Village Based Management to Enhance
Service Delivery to Women Migrant Workers and Families" di Desa Suana Sakti, Lampung
Timur, Lampung; Desa Gabang Ilir, Cirebon, Jawa Barat; Desa Sumberagung, Tulungagung &
Desa Ploso, Blitar Jawa Timur; Desa Camplang II, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

PENGUATAN KOORDINASI, DIALOG SOSIAL DAN JARINGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN



PELATIHAN DAN PENGORGANISASIAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN



PELATIHAN UNTUK LAYANAN YANG
TERKOORDINASI DAN RESPONSIVE GENDER
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

22 - 24 MARET 2021



PENGUATAN
KAPASITAS
APARATUR
DAN
FRONTLINE
UNTUK
LAYANAN
YANG
RESPOSIF
GENDER



HASIL PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP UNTUK PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SISTEM DAN MEKANISME

- Penguatan Kapasitas dan Kebijakan MRC-LTSA-DESA
- 4 Forum Tripartite Penguatan Koordinasi dan Dialog social
- 4 SOP Layanan, Monitoring dan Tracking System Responsif Gender
- 36 Regulasi dan Layanan Berbasis Desa
- RPJMD Memenuhi Kebutuhan PMI

PENYEDIAAN LAYANAN, PENJANGKAUAN DAN PENGORGANISASIAN

Konsultasi Pra – Kerja
Psiko-social Konseling
Informasi Resmi dan Sosialisasi
Training dan Pengorganisasian
Bantuan Hukum

PENINGKATAN KUALITAS AKSES, LAYANAN DAN KEBERLANJUTAN

- Pencegahan dan Pelindungan di setiap tahapan migrasi

- 300 Frontliners pemerintah dan non pemerintah serta kepolisian mendapat pelatihan (50% Women)
- 2800 PMI&Keluarga (80% Women) mendapat layanan
- 200 Penanganan Kasus (60% Women)
- 518 PMI mendapat pelatihan dan membentuk kelompok atau berserikat (60%)
- 36 Rancangan Peraturan Desa pasal 42 UUPPMI
- 36 Satgas PMI berbasis Desa



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



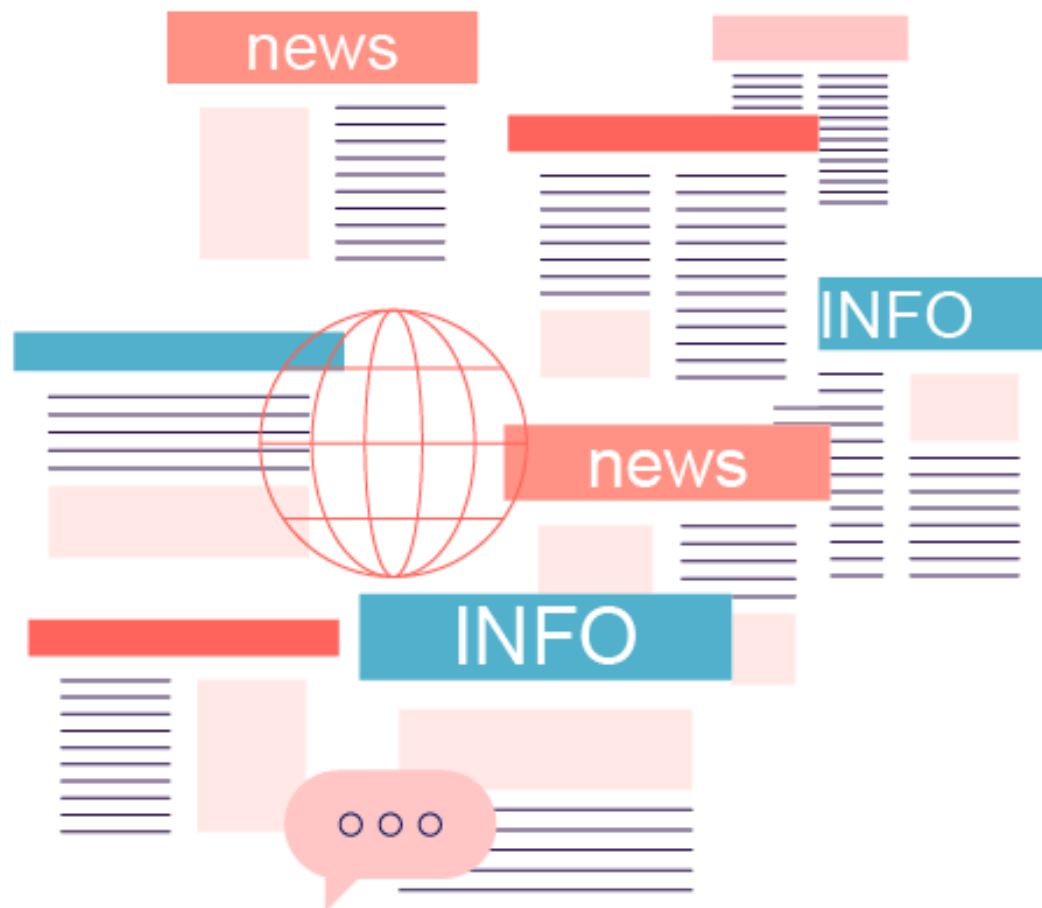
KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



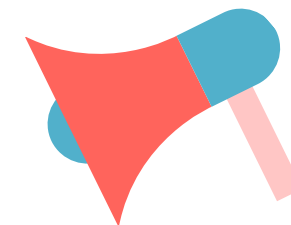
MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

27



**GOOD
NEWS
FROM
INDONESIA**





Gender-responsive migrant workers' protection crucial: Minister

© 30th March 2022



Screenshot of Minister of Manpower Ida Fauziyah during the gender-responsive Indonesian migrant workers protection and services guideline launch ceremony observed by virtual means in Jakarta on Wednesday (March 30, 2022).

“ Gender-responsive means that everyone will have equal access and rights, regardless of whether they are men or women ”

Jakarta (ANTARA) - Gender-responsive protection and services for Indonesian migrant workers are essential to ensure equality for women that are more vulnerable to varying forms of threats, according to Minister of Manpower Ida Fauziyah.

The minister stated that despite Indonesian migrant workers, particularly female workers, having a positive impact on the national social and economic development, they remain prone to threats of exploitation, abuse, and violation of their labor rights.

"If we speak about the gender-responsive standard operation procedure (SOP), it does not mean the SOP is reserved only for women. Gender-responsive means that everyone will have equal access and rights, regardless of whether they are men or women," Fauziyah stated during the gender-responsive Indonesian migrant workers protection and services guide launch ceremony observed virtually here on Wednesday.

The minister highlighted that female migrant workers have a higher vulnerability of being exposed to exploitation during their work period.

According to the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) Crisis Center data, some 12,508 cases were reported to the agency during the 2017-2019 period. Most complaints are filed by domestic workers, mostly women, and boat crews, she noted.

Most complaints reported by migrant workers pertain to human rights violations, work exploitation and unpaid wages, harassment and physical violence, as well as human trafficking, the minister highlighted.

The gender-responsive guide, completed under the collaboration between the ministry and representatives of the International Labour Organization (ILO) in Indonesia, is launched as an implementation of Article 2 of Law No. 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Fauziyah remarked.

The article mandates the authority to protect migrant workers by respecting equality of rights for all migrant workers and recognition of human rights, democracy, gender equality, non-discrimination, and anti-human trafficking values.

The minister expressed optimism that the guide would be implemented by officials while instructing relevant authorities to monitor the implementation and ministry's officials to disseminate information and also monitor implementation of the guide.

"(Those measures are necessary) because we want to ensure that our commitment will be fulfilled properly," Fauziyah remarked.

Related news: [Gov't unveils gender-responsive migrant workers' protection guideline](#)

Related news: [IPU ensures gender-friendly draft resolutions](#)

Related news: [Punish those involved in illegal migrant workers' placement: Minister](#)

Reporter: Prisca Triferma V, Nabil Ihsan
Editor: Sri Haryati
COPYRIGHT © ANTARA 2022



Menaker-ILO Rapat Bareng, Bahas Perlindungan PMI Responsif Gender

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews

Jumat, 04 Feb 2022 22:36 WIB



Foto: dok. Kemnaker

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama dengan ILO (International Labour Organization) Indonesia dan Jaringan Buruh Migran menggelar pertemuan untuk membahas tiga isu terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yakni rencana launching panduan teknis 'Tripartite Plus' tentang Pelindungan Pekerja Migran yang Responsif Gender, Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI, serta panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal).

Dalam pertemuan yang digelar secara daring pada hari ini, Ida menyambut baik inisiasi kajian yang telah dibahas secara bersama baik dari Kemnaker, ILO, maupun Jaringan Buruh Migran (JBM).

"Seluruh pemangku kepentingan ini perlu untuk menyelaraskan pemikiran bersama, terkait pentingnya memberikan perlindungan PMI yang berbasis pada kesetaraan gender, sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2017," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2/2022).

Lebih lanjut Ida mengatakan rencana launching Panduan Teknis Tripartite Plus perlu melihat momen yang tepat. Dia pun mengusulkan agar acara peluncuran dapat menyesuaikan pada hari International Women Day. Selain itu, terkait pada penyebutan forum Tripartite Plus, dia menilai perlu ada kesepakatan penamaan forum lebih lanjut.

"Hal ini untuk menghindari kesamaan penyebutan pada forum tripartit nasional yang sudah ada selama ini," katanya.

Dikatakan Ida, dirinya telah menginstruksikan kepada jajaran untuk meninjau ulang dan menyesuaikan secara teknis terkait Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Adapun soal Pembahasan ketiga, terkait panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal),

pihaknya telah membuat panduan yang telah diatur melalui Kepdiren Binapenta. Panduan ini juga telah diimplementasikan untuk negara penempatan Taiwan dan Korea Selatan.

Di samping itu, Ida juga mengingatkan pentingnya kampanye sosialisasi migrasi aman. "Kampanye ini harus terus dilakukan secara masif dan dibuat sekreatif mungkin, baik melalui kanal media sosial ataupun lainnya," terangnya.

Sementara itu, Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto, menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Ketenagakerjaan atas kolaborasi yang terjalin, terutama dalam membahas panduan secara teknis bagi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Salah satunya yang saat ini sedang dikaji terkait kesetaraan gender.

Dia menilai, setelah disepakatinya kajian bersama, maka perlu ada sosialisasi secara merata, baik kepada pemangku kepentingan di pemerintah pusat, daerah, perusahaan penempatan, serta asosiasi pekerja migran Indonesia.

(prf/ega)

<https://news.detik.com/berita/d-5928795/menaker-ilo-rapat-bareng-bahas-perlindungan-pmi-responsif-gender>



© 30th March 2022



<https://en.antaranews.com/news/222541/govt-unveils-gender-responsive-migrant-workers-protection-guideline>



"The Guideline and SOPs can provide protection, need fulfilment and case-handling that are responsive to different needs from various existing gender groups. Women migrant workers have positively contributed to social and economic development; yet they are also very vulnerable to exploitation and harassment as well as labour right violence"

- Ida Fauziyah, Minister of Manpower, Indonesia



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

32



**Minister of Manpower
Launched the Gender
Guideline and SOP on the
Provision of Services and
Protection of Indonesia
Migrant Worker
(Implementation of Law 18/17)**



**Spotlight
Initiative**



International
Labour
Organization



**KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA**



MRC
*Migrant Worker
Resource Centre*

33

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

PENINGKATAN KAPASITAS



PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK 692 PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PEMANGKU KEWAJIBAN

- **138** staf MRC dan LTSA dan penyedia layanan OMS (80 perempuan) di Blitar, Cirebon, Lampung Timur dan Tulungagung tentang migrasi yang aman, hak-hak ketenagakerjaan dan kesetaraan gender, dan isu-isu yang berdampak pada pekerja migran perempuan Indonesia melalui pelatihan Peningkatan Kapasitas Virtual.
- **81** (30 perempuan) MRC dan staf pemerintah penyedia layanan dilatih manajemen kasus dan psikososial.
- **175** pemerintah desa (45 perempuan) dilatih penyusunan peraturan desa yang responsif gender.
- **39** penyedia layanan dari serikat pekerja dan organisasi pekerja migran dilatih untuk mendukung pengorganisasian pekerja migran
- **950** pekerja rumah tangga migran perempuan meningkat kapasitasnya tentang hak-hak ketenagakerjaan, kesetaraan gender, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, kepemimpinan, dan pengorganisasian pekerja migran perempuan melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh MRC Cirebon dan MRC Lampung Timur. Bermitra dengan Pemerintah Desa, Serikat Pekerja dan Organisasi Perempuan pada tahun 2022.
- **230** Penyedia Layanan baik pemerintah dan swasta mendapatkan pelatihan tentang pengembangan kebijakan dan program yang terkoordinasi dan responsif gender. (salah satu referensi melalui panduan dan SOP)



Spotlight Initiative



International Labour Organization



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA



MRC
Migrant Worker Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap Untuk Pelindungan Pekerja Migran

35





Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



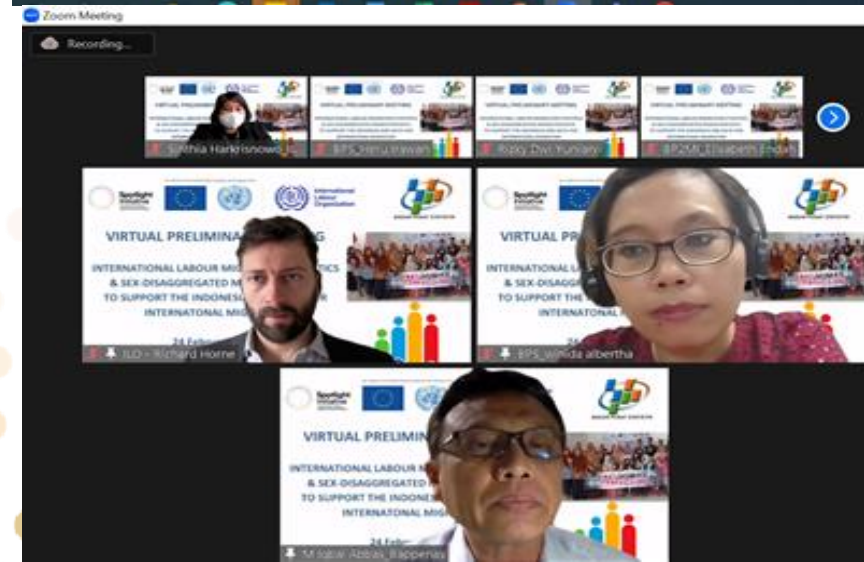
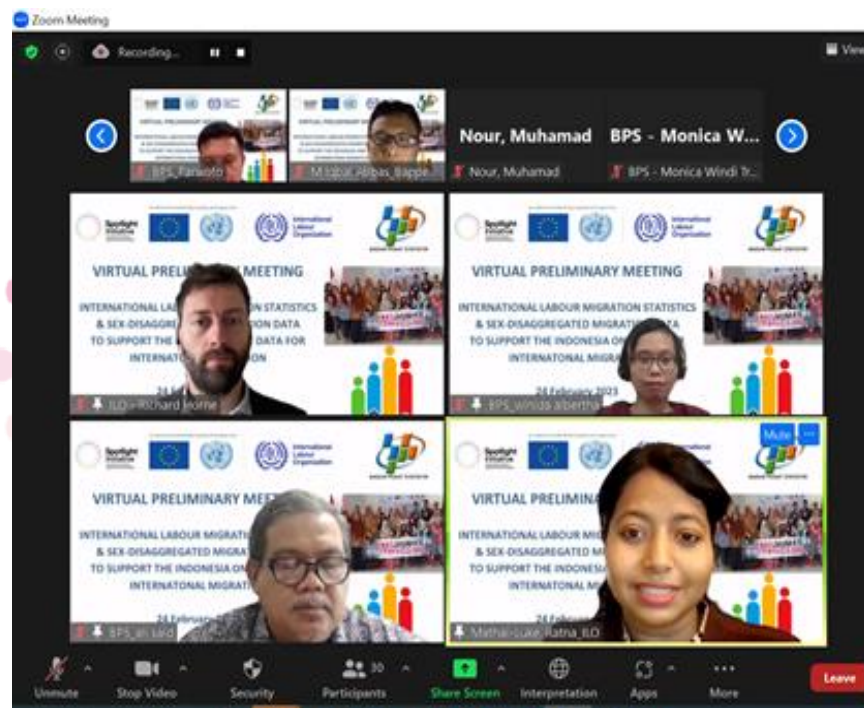
KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

36



DUKUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN SATU DATA MIGRASI INTERNASIONAL INDONESIA (SDMI) KERJASAMA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

- Pengembangan pedoman definisi dan konsep data Statistik Migrasi Kerja Internasional (ILMS) , yang disesuaikan dengan kebutuhan Satu Data Migrasi Internasional Indonesia pada platform Satu Data Migrasi Internasional, dan selaras dengan Basis Data ILMS ASEAN;
- Dukungan langkah-langkah operasional untuk mengkolaborasikan statistik migrasi tenaga kerja ke platform Satu Data Migrasi Internasional Indonesia, meliputi kebutuhan meta data, sejalan dengan ASEAN ILMS Database;
- Pelatihan Kementerian/Lembaga tentang proses pengiriman data migrasi tenaga kerja ke platform Satu Data Migrasi Internasional Indonesia



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

37

Pengorganisasian dan Peningkatan Keterampilan Perempuan Pekerja Migran





Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

38

Kegiatan Pengembangan Modul dan Peningkatan Kapasitas tentang Perencanaan Migrasi, Soft Skills dan Literasi Keuangan yang Responsif Gender untuk CPMI, PMI, Keluarganya dan Instruktur BLKLN

- Training untuk Instruktur BLKLN Pemerintah dan Swasta, BP2MI, Intala Latas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dengan peserta lebih dari 40 (40% perempuan) instruktur;
- Training untuk CPMI di BLKLN, Keluarga, Purna PMI di 6 kabupaten / kota kantong PMI, dengan peserta lebih dari 200 (80% perempuan) CPMI;





Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

39



Pengorganisasian dan peningkatan keterampilan perempuan pekerja migran

518 pekerja migran berjejaring dan atan bergabung dalam serikat pekerja, serikat pekerja migran dan jejaring baru di tingkat desa juga terbentuk.



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

40



Perubahan sikap dan pengetahuan diharapkan muncul sebagai hasil dari kampanye publik baik daring dan luring yang dilakukan:

Kampanye publik menjangkau 68,396 orang yang dilakukan lewat berbagai event dan medium:

- Perayaan Hari Migran Internasional, Hari Buruh Internasional, dan Hari Perempuan Internasional, dan rangkaian 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender,
- Sesi informasi disseminasi bekerjasama dengan Kemenaker.
- *Virtual Talkshow*
- Kampanye melalui sosial media
- Pameran yang menyajikan profil dan kisah perempuan pekerja migran Indonesia.
- Pentas Monolog
- Workshop untuk Vlogger PMI





Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

41

“Sedia Payung Sebelum Hujan
Musim Hujan Sudah Datang
Mari Terus Bergandengan Tangan
Terus Perjuangkan Pelindungan
Pekerja Migran”

”Pergi melancong ke Cirebon
Beli udang rebon didalam ember
Kita Semangat Berkegiatan
Agar Program dan Layanan Migrasi Kerja
semakin Responsif Gender”



Spotlight
Initiative



International
Labour
Organization



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA



MRC
Migrant Worker
Resource Centre

Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap
Untuk Pelindungan Pekerja Migran

42

TERIMA KASIH





International
Labour
Organization